

**ANALISIS YURIDIS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI
DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN
2016 DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Oleh

Gede Agil Cory Subhakti, 2014101182

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana proses penyelesaian mediasi dalam perkara wanprestasi pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016. (2) Bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara wanprestasi pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu sistem peraturan perundangundangan yang berlaku atau yang digunakan dalam suatu permasalahan hukum tertentu. Tidak hanya perundang-undangan tapi juga pengumpulan data dengan jenis penelitian normatif ini dapat menggunakan bahan pustaka lainnya. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma, sehingga penelitian hukum berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait kebijakan penerapan mediasi untuk penyelesaian sengketa atau perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama tidak perlu untuk diragukan lagi, hal ini terlihat jelas melalui beberapa kali perubahan atau revisi terhadap Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan terakhir adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Komitmen pelaksanaan mediasi ini selain terkait dengan kepentingan dan kewajiban bagi para hakim untuk memberikan rasa damai bagi para pihak yang bersengketa, juga meberikan kebutuhan secara praktis dalam hal penerapan azas peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana, serta untuk menekan penumpukan perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Kata Kunci : Media, Wanprestasi, Analisis

***JURIDICAL ANALYSIS OF MEDIATION IN SETTLEMENT OF DEFAULTS
REVIEWED FROM SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2016
IN THE SINGARAJA STATE COURT***

By

Gede Agil Cory Subhakti, 2014101182

Law Department

ABSTRACT

This research aims to find out (1) how the process of resolving mediation in default cases post PERMA Number 1 of 2016. (2) How effective mediation is in default cases post PERMA Number 1 of 2016 at the Singaraja District Court. The type of research used in this writing is normative legal research, normative legal research, namely research carried out by examining a system of laws and regulations that apply or are used in a particular legal problem. Not only legislation but also data collection with this type of normative research can use other library materials. Normative legal research functions to provide juridical arguments when there is a vacuum, ambiguity and conflict of norms, so that legal research plays a role in maintaining critical aspects of legal science as a sui generis normative science. There is no need to doubt the commitment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia regarding the policy of implementing mediation for resolving disputes or civil cases in the courts of first instance, this can be clearly seen through several changes or revisions to the Perma concerning Mediation Procedures in Courts. The latest change is Perma Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. This commitment to implementing mediation is not only related to the interests and obligations of judges to provide a sense of peace for the disputing parties, but also provides practical needs in terms of implementing the principles of justice that are fast, low cost and simple, as well as to reduce the buildup of cases at the cassation and cassation levels. judicial review.

Keywords: Media, Default, Analysis